

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap pemerintah daerah berkewajiban mengelola keuangan secara tertib, taat aturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah selama satu periode adalah dengan laporan keuangan pemerintah, Laporan ini disusun berdasarkan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang setidaknya berisikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sehingga terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Laporan yang berkualitas memiliki karakteristik antara lain Relevan, Andal, Dapat dipahami, serta Dapat dibandingkan (PP No. 71, 2010). Sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna.

Namun masih sering terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan ditingkat OPD sehingga menyebabkan harus bekerja ekstra pada saat laporan keuangan harus diserahkan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu karakteristik laporan keuangan yaitu informasi yang disajikan harus relevan diantaranya memiliki umpan balik, tepat waktu, lengkap dan prediktif.

Setiap tahunnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan penilaian atas kualitas laporan keuangan dengan melaksanakan audit. Penilaian Biro Keuangan terhadap laporan keuangan OPD yang dilihat dari 4 (empat) aspek sebagai berikut : kemampuan dalam menyajikan penghitungan LRA dan Neraca

dengan tepat, penjelasan terhadap ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan terhadap pos-pos laporan keuangan, dan penjelasan terinci terhadap aset tetap (Cahyo,dkk. 2015). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu : 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified opinion*), 3) Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer opinion*), 4) Opini Tidak Wajar (*Adverse opinion*).

Meskipun jumlah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang di dapat pada tahun 2014 meningkat 20 persen dari tahun 2013, sehingga dapat diartikan bahwa kualitas pertanggungjawaban APBN mengalami perbaikandan peningkatan opini wajar tanpa pengecualian tersebut. Namun di sisi lain BPK menemukan penyimpangan anggaran senilai Rp3,20 triliun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 pada Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015.

Tata kelola keuangan pemerintah daerah masih menjadi masalah yang sangat serius danharus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk program-program kemakmuran rakyat. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada periode 2013 , sebanyak 156 dari 524 pemerintah daerah masih mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Serta sebanyak 280 pemerintah daerah memiliki laporan keuangan yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, salah satunya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Trisaptya,dkk. 2016).

Faktanya, sebanyak 60 persen dari total kasus yang ditangani komisi antikorupsi itu berasal dari laporan BPK. Seharusnya dengan total aset pemerintah daerah yang mencapai Rp2.006 triliun, menunjukkan program-program yang dilakukan di daerah mengalami peningkatan sehingga dapat terciptanya kemakmuran pada masyarakat. Tetapi pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terlebih dahulu fokus memperbaiki tata kelola keuangan Negara.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memadai dan kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah serta organisasional tentang pemerintah (Andini,dkk.2015).Kompetensi ini meliputi keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributs*).Kompetensi pengelola keuangan yang berkompeten dalam bidang keuangan dapat dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan pengelola keuangan maka semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuannya. Selain itu kompetensi pengelola keuangan seharusnya ditunjang dengan latar belakang pendidikan akuntansi, berpengalaman dibidang akuntansi, dan sering mengikuti pelatihan atau pendidikan akuntansi agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, sehingga terciptanya laporan keuangan yang mempunyai kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Hasil penelitian Harlinda(2016) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Namun penelitian Firdaus,dkk.(2015) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Pemanfaatan Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi (Nadir,dkk.2017). Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi komputer akuntansi mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan daerah sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik. Di samping itu kompetensi sumber daya manusia(SDM) faktor yang sangat penting dalam menyusun laporan keuangan yang mempunyai kualitas informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia harus sejalan dengan regulasi yang diterapkan pada pemerintah yaitu berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian Firdaus,dkk.(2015) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Namun penelitian Riandani (2017) menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu dasar didalam penerapan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan adalah sistem akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)

No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan harus memenuhi prinsip-prinsip SAP yang merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Tetapi masih rendahnya tingkat pemahaman tentang SAP membuat kualitas laporan keuangan menurun, dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum dan penerapan akuntansi pemerintahan mempunyai kewajiban untuk segera menerapkan SAP berbasis akrual. Setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah di dalam SAP diwajibkan melaporkan upaya-upaya kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kerja. Hasil penelitian Firdaus,dkk. (2015) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun penelitian Kesuma (2017) menyatakan bahwa standart akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan adanya pengendalian internal ini diharapkan hasil dari laporan keuangan dapat memberikan informasi andal dan jujur sehingga tidak merugikan organisasi dalam mengambil keputusan. Pengendalian internal pemerintah juga merupakan pengendalian yang harus diterapkan pada lingkungan SKPA untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja pemerintah serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Unsur

dari sistem pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk mencapai tujuan dari pengendalian internal, jika kelima elemen pengendalian internal telah cukup dan dilaksanakan (PP No. 60, 2008). Jika penerapan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan yang dihasilkan andal, aset daerah tetap aman dan perundang-undangan dijalankan maka dapat tercipta tata kelola pemerintah yang baik. Hasil penelitian Kartika, dkk. (2015) menyatakan bahwa pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian Mokoginta, dkk. (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah yang baik menjukan keberhasilan dalam menjalankan tugas dalam membangun daerah sesuai tujuan yang telah direncanakan. Pengelolaan keuangan setiap pemerintah daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Para pemakai laporan keuangan diharapkan dapat mengakses informasi dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Hasil penelitian Mokoginta, dkk. (2015) menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian Kesuma, dkk. (2017) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM),

pemanfaatan teknologi informasi, standar akuntansi pemerintah(SAP), penerapan pengendalian internal, dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, ternyata hasil yang ditunjukkan masih berbeda-beda.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin meneliti kembali tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, standar akuntansi pemerintah(SAP), penerapan pengendalian *intern*, dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini mengacu pada Firdaus,dkk. (2015), Juliani,dkk.(2015) dan Desmaria,dkk. (2017). Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah dengan penambahan variabel pengendalian internal Juliani,dkk. (2015) dan *good governance* Desmaria,dkk.(2017), serta objek penelitian ini dilakukan di pemerintahan kabupaten Pati.

Rumusan Masalah

Setiap pemerintah daerah dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan.laporan keuangan yang berkualitas tidak terlepas dari penyusunan yang berdasarkan kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, standar akuntansi pemerintahan, pengendalian internal serta tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) menunjukkan laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif dengan di tunjang kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal yang dilakukan sehingga dapat terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik.Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
- 2) Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
- 3) Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
- 4) Bagaimana pengaruh pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
- 5) Bagaimana pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang kemudian diidentifikasi ke dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji :

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- 4) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- 5) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

dapat dijadikan referensi atau acuan dalam pengembangan ilmu atau pelatihan akuntansi sector public khususnya dibidang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dibidang tersebut.

2. Aspek Praktis

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.